

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi merupakan sistem politik yang menempatkan partisipasi rakyat sebagai elemen utama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui mekanisme perwakilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.¹ Dalam konteks ini, rakyat menjadi sumber legitimasi dan legalitas kekuasaan negara melalui pelaksanaan pemilihan umum (pemilu).² Pemilu menjadi perwujudan nyata dari kedaulatan rakyat dalam memilih wakil-wakil yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab guna mewakili serta menyuarakan kepentingan publik.

Pemilihan umum sebagai pesta demokrasi tercermin pada partisipasi masyarakat yang menjadi elemen kunci dari demokrasi itu sendiri. Masyarakat sebagai pemilih menunjukkan pola-pola perilaku yang beragam dalam mengekspresikan preferensi ideologis dan politiknya. Perilaku memilih merujuk pada keputusan pemilih dalam menentukan calon pemimpin yang dianggap pemilih paling mampu menjalankan tugas dan memenuhi kebutuhan masyarakat.³ Keputusan tersebut mencakup pilihan untuk memilih maupun tidak memilih (to

¹ Alfon Apriel Simanullang dkk, *Analisis Perilaku Memilih Masyarakat untuk Pemilu 2024 ditinjau Dari Perilaku Pemilih Masyarakat Dalam Pilpres 2019 (Studi Kasus Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan Pantai Cermin)*, Majalah Ilmiah METHODDA, Vol. 13 (2), hlm 86.

² Said Gatara dan Moh. Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Pustaka Setia, Bandung, hlm 190.

³ Ira Indra Gerungan. 2017, *Perilaku Memilih Masyarakat Desa Touliang pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara 2015 (suatu Studi di Desa Touliang Kakas Kecamatan Kakas Barat Kabupaten Minahasa)*, Politico: Jurnal Ilmu Politik, 6(4), hlm 3.

vote or not to vote), serta pilihan terhadap kandidat tertentu (*vote for a specific candidate*).⁴

Dalam kajian teori perilaku pemilih, terdapat tiga pendekatan utama yang digunakan untuk menjelaskan perilaku tersebut, yaitu pendekatan sosiologis, psikologis, dan pilihan rasional. Pendekatan sosiologis, yang dikembangkan oleh *Columbia University Bureau of Applied Social Science*, menyatakan bahwa keputusan memilih dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial seperti status ekonomi, tempat tinggal, dan agama.⁵ Sementara itu, pendekatan psikologis yang dikembangkan oleh *University of Michigan's Survey Research Center*, menekankan pentingnya persepsi dan keterikatan emosional individu terhadap kandidat atau partai politik.⁶ Terakhir, pendekatan pilihan rasional, sebagaimana dikemukakan oleh James Coleman, melihat perilaku memilih sebagai tindakan individu yang bersifat rasional dan didasarkan pada kalkulasi untung-rugi terhadap hasil yang mungkin diperoleh.⁷

Menurut Saiful Mujani, pendekatan sosiologis menjelaskan bahwa perilaku memilih dipengaruhi oleh variabel-variabel sosial seperti tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, pendapatan, agama dan tingkat religiusitas, etnisitas, sentimen kedaerahan, domisili, jenis kelamin, dan usia.⁸ Dieter Roth menambahkan bahwa indikator utama dari pendekatan ini adalah faktor sosial-ekonomi, keagamaan, dan

⁴ Efriza, 2012, *Political Explore*, Alfabeta: Bandung, hlm 40.

⁵ Afan Gaffar, 1992, *Javanese Voters: A case Study of Election Under a Hegemonic Party System*, Jogjakarta, Gajah Mada University Press, hlm 4-9.

⁶ *Ibid.*

⁷ Goerge Ritzer, 2004, *Encyclopedia of Social Theory*, College Park: SAGE Publications Inc., hlm 111.

⁸ Saiful Mujani, dkk, 2012, *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Memilih dalam Pemilihan Legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Mizan Publika, hlm 6.

tempat tinggal, yang berkaitan erat dengan konstruksi identitas.⁹ Pendekatan ini sangat relevan untuk menganalisis bagaimana identitas keagamaan memengaruhi perilaku memilih, khususnya di Kota Padang, Sumatera Barat, yang secara kultural dikenal kuat memegang nilai-nilai konservatisme syariah melalui falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*.

Selanjutnya, pendekatan pilihan rasional berfokus pada pertimbangan ekonomi sebagai faktor penentu pilihan politik. Pemilih mengevaluasi kandidat berdasarkan kinerja ekonomi dan memberi apresiasi (*reward*) atau sanksi (*punishment*) terhadap hasil kebijakan.¹⁰ Hal ini selaras dengan pendapat Michael Lewis Back, bahwa kinerja ekonomi merupakan faktor utama dalam membentuk popularitas kandidat.¹¹ Misalnya ketika kondisi ekonomi nasional dinilai positif, pemilih cenderung memberikan penghargaan politik kepada petahana dengan kembali memilihnya. Sebaliknya, bila kondisi ekonomi memburuk, maka legitimasi politik petahana dapat menurun, dan pemilih akan cenderung beralih kepada kandidat alternatif.¹²

Pada kontestasi Pemilihan Presiden tahun 2024, terdapat terdapat tiga peserta pasangan calon yang bertarung. Pasangan calon nomor urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar diusung oleh Partai Nasdem, PKB dan PKS. Pasangan calon nomor urut 02, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming diusung

⁹ Dieter Roth, 2009, *Studi Pemilu Empiris: Sumber, Teori ± Teori, Instrumen dan Metode*, Jakarta: Lembaga Survei Indonesia, hlm 24-25.

¹⁰ Saiful Mujani, R. William Liddle & Kuskridho Ambardi, 2012, *Kuasa rakyat: Analisis tentang perilaku memilih dalam pemilihan legislatif dan presiden Indonesia pasca orde baru*, Mizan Media Utama, hlm 13.

¹¹ Michael S. Lewis-Beck & Mary Stegmaier, 2018, *Economic voting*, The Oxford Handbook of Public Choice, 1, hlm 1.

¹² *Ibid*.

oleh Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Demokrat, PAN, PSI, PBB dan Partai Garuda. Terakhir, pasangan calon nomor urut 03, Ganjar Pranowo-M. Mahfud MD diusung oleh PDIP, PPP, Perindo dan Partai Hanura.

Berdasarkan hasil perhitungan suara resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran berhasil memenangkan pemilihan dengan perolehan 96.214.691 suara. Lalu diikuti dengan pasangan Anies-Muhaimin dengan perolehan 40.971.906 suara dan Ganjar-Mahfud dengan perolehan 27.050.878 suara.¹³ Berikut data koalisi dan perolehan suara masing-masing calon pada Pemilihan Presiden tahun 2024:

Tabel 1. 1 Data Perolehan Suara Nasional pada Pemilihan Presiden Tahun 2024



No Urut	Pasangan Calon	Koalisi Partai	Perolehan Suara	Persentase Suara
01	Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar	Nasdem, PKB, PKS	40.971.906	24,95
02	Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka	Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PSI, PBB dan Garuda	96.214.691	58,58
03	Ganjar Pranowo-M. Mahfud MD	PDIP, PPP, Perindo, dan Hanura	27.040.878	16,47

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2025

Namun demikian, hasil pemilu di Kota Padang menunjukkan pola yang berbeda secara signifikan. Di Kota Padang pasangan Anies-Muhaimin meraih suara tertinggi dengan perolehan 300.680 suara atau setara 61,4% suara.

¹³ KPU Republik Indonesia, Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden RI 2024 Tingkat Nasional, diakses 13 Januari 2025 pada https://sirekap-obj-formd.kpu.go.id/cfed/pemilu/0_DD1_ppwp_0_1711041703_22002b1a-f74f-48e9-a48f-b57d9cca09d4.pdf

Mengalahkan pasangan Prabowo-Gibran dengan perolehan 170.037 suara atau setara 34,7% suara sah, serta pasangan Ganjar-Mahfud dengan perolehan 18.772 suara atau setara 3,8% suara sah.¹⁴ Berikut data perolehan suara pada pemilihan presiden di Kota Padang:

Tabel 1. 2 Data Perolehan Suara Pemilihan Presiden 2024 di Kota Padang

No	Pasangan Calon	Kota Padang	
		Perolehan Suara	Persentase Suara
1	Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar	300.680	61,4
2	Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka	170.037	34,7
3	Ganjar Pranowo - M. Mahfud MD	18.772	3,8

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2025

Perbedaan hasil ini mencerminkan adanya perbedaan perilaku memilih antara masyarakat Kota Padang dan pemilih secara nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dinamika sosial-politik lokal, termasuk nilai budaya dan keagamaan yang dominan, turut memengaruhi orientasi politik masyarakat. Selain itu, faktor ekonomi juga diyakini memainkan peran dalam membentuk preferensi pemilih di wilayah tersebut.¹⁵

Penelitian-penelitian sebelumnya mengenai pengaruh identitas keagamaan dan persepsi kinerja ekonomi terhadap perilaku memilih telah dilakukan oleh sejumlah akademisi seperti R. William Liddle dan Saiful Mujani,¹⁶ Sara Moricz

¹⁴ KPU Republik Indonesia, Rekapitulasi Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden RI 2024 Provinsi Sumatera Barat, diakses 13 Januari 2025 pada https://sirekap-obj-formd.kpu.go.id/17a6/pemilu/0_DC1_ppwp_191087_1710304687_1dda2660-9bcd-4739-94ca-15ea7cf95049.pdf

¹⁵ Hairunnas, 2021, *Demokrasi Dan Praktik Konservatisme Ormas Keagamaan Di Sumatra Barat*, Thesis, Universitas Andalas.

¹⁶ R. William Liddle dan Saiful Mujani, 2007, *Leadership, Party, and Religion: Explaining Voting Behavior in Indonesia*, Comparative Political Studies, 40(7), hlm 832-857.

dan Fredrik Sjöholm,¹⁷ Takayuki Higashikata dan Koichi Kawamura,¹⁸ Marcus Mietzner dan Burhanuddin Muhtadi,¹⁹ Nurdien Aji dan Teguh Dartanto,²⁰ Thomas Pepinsky,²¹ Saiful Mujani,²² Nathanael Gratias Sumaktoyo,²³ Whinda Yustisia, Moh Abdul Hakim dan Idhamsyah Eka Putra,²⁴ dan Arya Budi.²⁵

Perbedaan utama antara penelitian-penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada konteks pemilu. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada Pemilu Presiden 2014 dan 2019 yang hanya diikuti oleh dua pasangan calon, sehingga menghasilkan pola polarisasi politik yang ekstrem. Sebaliknya, penelitian ini mengkaji Pemilu Presiden 2024, yang menghadirkan tiga pasangan calon, sehingga tingkat polarisasinya relatif menurun akibat suara yang terfragmentasi ke berbagai kelompok.

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi faktor mana yang lebih dominan, identitas keagamaan atau

¹⁷ Sara Moricz dan Fredrik Sjöholm, 2014, *The Effect of Elections on Economic Growth: Results from a Natural Experiment in Indonesia*.

¹⁸ Takayuki Higashikata dan Koichi Kawamura, 2015, *Voting Behavior in Indonesia from 1999 to 2014 Religious Cleavage or Economic Performance?*, Ide Discussion No.512, hlm 1-43.

¹⁹ Marcus Mietzner & Burhanuddin Muhtadi, 2018, *Explaining the 2016 Islamist Mobilisation in Indonesia: Religious Intolerance, Militant Groups and the Politics of Accommodation*, Asian Studies Review, 42(3), hlm 479-497.

²⁰ Nurdien Aji dan Teguh Dartanto, 2018, *Behind the Jokowi's Victory: Did Economic Voting Matter in The 2014 Indonesian Presidential Election?*, Asia-Pacific Journal of Regional Science, 2, hlm 115-138.

²¹ Thomas Pepinsky, 2019, *Islam and Indonesia's 2019 Presidential Election*, Asia Policy, 14(4), hlm 54-62.

²² Saiful Mujani, 2020, *Religion and Voting behavior Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election*, Al-Jami'ah: Journal of Islamic Studies, 58(2), hlm 419-450.

²³ Nathanael Gratias Sumaktoyo, 2021, *Ethnic and Religious Sentiments in Indonesian Politics: Evidence from the 2017 Jakarta Gubernatorial Election*, Journal of East Asian Studies, 21(1), hlm 141-164.

²⁴ Whinda Yustisia, Moh Abdul Hakim dan Idhamsyah Eka Putra, 2023, *What Determines Incumbent Vote in Indonesia? Understanding The Roles of Economic Conditions, Religiousness, Political Ideology, and Incumbent Performance*, Analyses of Social Issues and Public Policy, 23(2), hlm 453-473.

²⁵ Arya Budi, 2024, *Does Religious Identity Moderate Economic Voting? Evidence from Indonesia*, Muslim Politics Review, 3(1), hlm 4-43.

persepsi kinerja ekonomi dalam memengaruhi perilaku memilih pada konteks polarisasi rendah. Penelitian ini juga bertujuan mengisi kesenjangan literatur dan memberikan perspektif yang lebih holistik dalam memahami perilaku pemilih, khususnya di daerah dengan karakteristik sosial yang khas seperti Kota Padang.

1.2 Rumusan Masalah

Pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024, terdapat perbedaan signifikan terhadap perolehan suara antara nasional dan perolehan suara di Kota Padang. Secara nasional pasangan Prabowo–Gibran meraih 58,58% suara, sedangkan di Kota Padang pasangan Anies–Muhaimin unggul dengan 61,4%.²⁶ Perbedaan ini mencerminkan bahwa perilaku memilih masyarakat Kota Padang dipengaruhi oleh konteks lokal yang khas dan tidak selalu sejalan dengan tren nasional.²⁷

Secara sosiologis, masyarakat Kota Padang didominasi etnis Minangkabau yang dalam kehidupan sehari-harinya menjunjung falsafah Adat *Basandi Syara’-Syara’ Basandi Kitabullah (ABS–SBK)*.²⁸ Falsafah ini memadukan nilai adat Minang dan ajaran Islam secara seimbang, lalu membentuk karakter konservatisme agama yang kuat. Ciri konservatisme ini tampak dalam kecenderungan puritan dengan slogan “Kembali kepada Al-Qur’an dan Sunnah”

²⁶ KPU Republik Indonesia, *loc.cit.*

²⁷ Asin Elisabet Br. Barus, 2023, *Dinamika Identitas Sosial Dalam Masyarakat Majemuk: Tinjauan Dari Aspek Politik*, Literacy Notes, 1(2), hlm 4.

²⁸ Hairunnas, *loc.cit.*

serta beraliran Salafi-Wahabi,²⁹ dimana norma agama menjadi tolak ukur utama dalam menilai kandidat politik.³⁰

Pada ruang kebijakan, konservatisme agama diwujudkan melalui penerapan Peraturan Daerah (Perda) Syariah, mencakup ketentuan berpakaian, pendidikan Islam, zakat, dan akhlak.³¹ Keberadaan perda ini selanjutnya semakin memperkuat identitas keagamaan sebagai faktor politis. Hal ini terlihat pada penolakan terhadap proyek-proyek yang dianggap bertentangan dengan nilai ABS–SBK, seperti penolakan pendirian rumah sakit siloam dan penolakan budaya krematorium oleh etnis minoritas Tionghoa di Kota Padang.³²

Fenomena konservatisme ini juga terlihat pada perilaku memilih pada pemilu, dimana pemilih cenderung menolak partai atau kandidat yang dianggap tidak selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan adat. Misalnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang dipersepsikan sebagai representasi nilai-nilai sekuler yang kurang selaras dengan adat dan agama setempat.³³ Akibatnya, setiap kebijakan atau sikap politik yang dinilai bertentangan dengan norma ABS–SBK

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Muhammad Padli, 2020, *Pengaruh Takah, Tageh dan Tokoh Terhadap Perilaku Memilih Masyarakat Sumatera Barat Pada Pemilihan Presiden 2019*, Skripsi, Universitas Andalas, hlm 6.

³¹ Pada tahun 2003-2005, keberadaan perda syariah semakin berkembang di Sumatera Barat karena didorong oleh dukungan oleh elit lokal legislatif dan eksekutif serta ormas Islam dan ormas adat di Sumatera Barat. Adapun ormas Islam dan ormas adat tersebut sebagai berikut: Forum Tokoh Peduli Syariah (FTPS), Forum Masyarakat Minang (FMM), Paga Nagari Sumbar (PNS), Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM), Komite Penerapan Syari'at Islam (KPSI), Gerakan Muslim Minangkabau (GMM), Forum Penegak Syariat Islam (FPSI), Fardu'ain, dan Forum Libas Sumbar (FLS). Rujuk Zulfadli, Dewi Anggraini dan Mhd Fajri, *From Formalization of Sharia to Islamic Conservatism: The Post Reform of Islamic Movement Phenomena in West Sumatera*, Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 17(1), hlm 9, untuk pembahasan lebih lanjut.

³² Zulfadli, Dewi Anggraini dan Mhd Fajri, *From Formalization of Sharia to Islamic Conservatism: The Post Reform of Islamic Movement Phenomena in West Sumatera*, Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat, 17(1), hlm 9.

³³ Fatri Yelli Agusti dan Eka Vidya Putra, 2020, *Studi Kelembagaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Sumatera Barat Menghadapi Efek Ekor Jas Pemilu 2019*, Jurnal Perspektif, 3(3), 494.

mudah menuai penolakan, terutama jika kandidat atau partai dinilai tidak mencerminkan identitas keagamaan mayoritas.³⁴

Meskipun PDI-P pernah meraih kemenangan nasional pada Pemilu 1999, 2014, dan 2019, partai ini secara konsisten gagal memperoleh dukungan mayoritas di tingkat legislatif maupun eksekutif di Kota Padang dan provinsi Sumatera Barat, termasuk dalam pemilihan presiden.³⁵ Hal ini menegaskan bahwa dukungan di level lokal sangat ditentukan oleh kesesuaian antara platform partai dengan nilai-nilai religius dan adat Minangkabau.

Sebaliknya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) secara konsisten mendapatkan dukungan kuat dari masyarakat Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, baik dalam pemilihan legislatif, kepala daerah, maupun pemilihan presiden. Keberhasilan PKS ini terutama disebabkan oleh pendekatan partai yang menekankan nilai-nilai agama Islam dalam setiap aktivitas politiknya, sehingga mampu meraih kepercayaan dan simpati pemilih religius. Pengaruh PKS terlihat jelas dari hasil lima pemilihan presiden terakhir di Kota Padang, dimana pasangan calon yang diusung PKS selalu unggul.³⁶

Keberhasilan PKS dalam memengaruhi perilaku memilih masyarakat Kota Padang dibuktikan oleh tren lima pemilihan presiden terakhir, dimana pasangan calon yang diusung PKS selalu meraih suara tertinggi di wilayah ini. Sebagai perbandingan, pasangan calon dari PDI-P justru gagal unggul di setiap kontestasi

³⁴ Kompas.com. (2019, Mei 13). *Gagal di dapil Sumbar, PDI-P dinilai tersandung politik identitas*. Diakses <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/13/11531141/gagal-di-dapil-sumbar-pdi-p-dinilai-tersandung-politik-identitas> pada 15 Januari 2025.

³⁵ Afriandi, *loc.cit.*

³⁶ Rusli, dkk, 2021, *Analisis Kemenangan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Sumatera Barat (2009-2020)*, Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam, 17(1), 69-83.

tersebut. Pada tabel 1.3 disajikan perolehan suara kedua partai tersebut dalam lima pemilihan presiden terakhir di Kota Padang.

Tabel 1. 3 Perbandingan Perolehan Suara Capres-Cawapres yang diusung PKS dan PDI-P di Kota Padang Tahun 2004-2024

Tahun	Pasangan Calon diusung PKS dan Perolehan Suara	Pasangan Calon diusung PDI-P dan Perolehan Suara
2004	Susilo Bambang Yudhoyono dan Jusuf Kalla (84%)	Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi (16%)
2009	Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono (79,91%)	Megawati Soekarnoputri - Prabowo Subianto (5,9%)
2014	Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa (76,9%)	Joko Widodo - Jusuf Kalla (23,1%)
2019	Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno (85,92%)	Joko Widodo - Ma'ruf Amin (14,08%)
2024	Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (61,4%)	Ganjar Pranowo - Mahfud MD (3,8%)

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2025

Fenomena kemenangan dukungan terbaru PKS terlihat pada Pilpres 2024, dimana pasangan Anies-Muhaimin berhasil memanfaatkan jaringan relawan dan basis massa PKS di Sumatera Barat, sehingga meraih dukungan signifikan dan memenangkan suara di Kota Padang.³⁷ Selain itu, pasangan Anies yaitu Muhaimin Iskandar, yang merupakan kader Nahdlatul Ulama (NU), turut memperkuat daya tarik koalisi mereka di Sumatera Barat.³⁸

Secara sosiologis, masyarakat Kota Padang cenderung memilih kandidat yang selaras dengan identitas keagamaan dan adat Minangkabau.³⁹ Hal ini selaras dengan penuturan pakar politik Universitas Andalas, Asrinaldi, bahwa

³⁷ Kabar Sumatra, *Ini Alasan Masyarakat Sumbar Lebih Banyak Pilih Anies Ketimbang Prabowo*, diakses 15 Mei 2025 pada <https://sumatra.bisnis.com/read/20240216/533/1741582/ini-alasan-masyarakat-sumbar-lebih-banyak-pilih-anies-ketimbang-prabowo>

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Kahirunnisyah Nasution, dkk, 2024, *Pengaruh Identitas Etnis Politik Terhadap Perilaku Pemilih: (Studi Kasus Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020)*, Public Service and Governance Journal, 5(1), 127-140.

kemenangan pasangan calon ini tak lepas dari keselarasan Anies dengan filosofi Minangkabau, *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah* (ABS-SBK), karena ia dikenal sebagai sosok religius yang taat beragama dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dalam setiap kampanye.⁴⁰

Lalu fenomena kekalahan PDI-P terlihat pada Pilpres 2014 dan 2019, dimana Jokowi berhasil menang di nasional namun selalu kalah telak di Kota Padang dan Sumatera Barat secara umum. Analisis para pengamat, seperti Burhanuddin Muhtadi⁴¹ dan Adi Prayitno⁴² menunjukkan bahwa hal ini berkaitan dengan fakta bahwa Jokowi berasal dari PDI-P⁴³ partai yang kerap bertentangan dengan aspirasi Islam lokal (misalnya penolakan Perda Syariah dan pembubaran FPI)⁴⁴ serta anggapan bahwa Jokowi yang tidak memenuhi kriteria “3T” (*Takah, Tageh, Tokoh*) Minangkabau. Hal ini selanjutnya berpengaruh terhadap penerimaan masyarakat (*approval rating*) terhadap Jokowi selama menjadi Presiden di Kota Padang.

Penerimaan masyarakat (*approval rating*) terlihat pada tingkat kepuasan masyarakat Kota Padang maupun Sumatera Barat terhadap Jokowi selama masa jabatannya relatif rendah dibandingkan nasional, bahkan pada periode pertama (2014-2019) sering di bawah 50%. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tahun 2024, ditemukan hasil tingkat kepuasan

⁴⁰Kabar Sumatra, *loc.cit.*

⁴¹ INDIKATOR, 2024, *Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo*, diakses <https://indikator.co.id/rilis-indikator-04-oktober-2024/> pada 15 Januari 2025.

⁴² Kompas.com, *Kalah Telak di Sumbar, Prestasi Jokowi Tak Mampu Luluhkan Politik Identitas*, diakses <https://nasional.kompas.com/read/2019/05/13/12132811/kalah-telak-di-sumbar-prestasi-jokowi-tak-mampu-luluhkan-politik-identitas> pada 15 Januari 2025.

⁴³ Fadli Afriandi, 2021, *Rendahnya Dukungan terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Sumatera Barat, Indonesia*, JISPO Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 11(1), hlm 140.

⁴⁴ *Ibid.*

publik terhadap kinerja Jokowi di Sumatera Barat (55%) dan di kalangan etnis Minang (50,2%) berada jauh di bawah rata-rata nasional (81%). Sebaliknya, yang menyatakan kurang puas dan tidak puas mencapai 38,6%, sedangkan 6% tidak menjawab atau tidak tahu.⁴⁵

Temuan serupa dari Spektrum Politika⁴⁶ dan Voxpol Center⁴⁷ menunjukkan bahwa 46,5% pemilih Kota Padang bertindak rasional berdasarkan kondisi ekonomi ketika menentukan pilihan politik. Lebih lanjut peneliti Spektrum Politika, Andri Rusta, menjelaskan bahwa ketidakpuasan ini didasarkan atas kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah terutama pada kebijakan-kebijakan yang diberikan. Dalam hal ini, pemerintah dianggap gagal dalam pemenuhan ekonomi masyarakat karena daya beli masyarakat yang menurun, penangan kebijakan sembako dan bantuan yang buruk juga memperkuat rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.⁴⁸

Lebih lanjut untuk melihat kondisi ekonomi Kota Padang, disajikan data kondisi ekonomi makro meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, gini ratio, dan kemiskinan.⁴⁹

⁴⁵ INDIKATOR, 2024, *Evaluasi Publik Terhadap 10 Tahun Pemerintahan Presiden Joko Widodo*, diakses <https://indikator.co.id/rilis-indikator-04-oktober-2024/> pada 15 Januari 2025.

⁴⁶ Haluan Padang, 2021, *Tingkat Kepuasan Warga Etnis Minang pada Jokowi Rendah: Benar Tidak Puasa tau Masih Dendam?*, diakses dari <https://padang.harianhaluan.com/fokus/pr-1061088898/tingkat-kepuasan-warga-etnis-minang-pada-jokowi-rendah-benar-tidak-puas-atau-masih-dendam> pada 30 Januari 2025.

⁴⁷ Antara News, 2020, *Survei: Pemilih Rasional di Pilkada Sumbar Capai 46,5 Persen*, diakses <https://www.antaranews.com/berita/1853472/survei-pemilih-rasional-di-pilkada-sumbar-capai-465-persen> pada 15 Januari 2025.

⁴⁸ Haluan Padang, 2021, *Tingkat Kepuasan Warga Etnis Minang pada Jokowi Rendah: Benar Tidak Puasa tau Masih Dendam?*, diakses dari <https://padang.harianhaluan.com/fokus/pr-1061088898/tingkat-kepuasan-warga-etnis-minang-pada-jokowi-rendah-benar-tidak-puas-atau-masih-dendam> pada 30 Januari 2025.

⁴⁹ Arosyid Abrian Loka, dkk, 2024, *Pengaruh Angkatan Kerja, Inflasi, Pengangguran dan Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Periode (2014-2023)*, Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Vol. 2 (3), hlm 178.

Pertama, pertumbuhan ekonomi untuk mengetahui kondisi perkembangan ekonomi. Berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku⁵⁰ triwulan III-2024 mencapai Rp5.638,9 triliun dengan pertumbuhan ekonomi 4,95%.⁵¹ Pertumbuhan ini termasuk lambat dan masih jauh dari target pertumbuhan ekonomi, yaitu 7%.⁵² Disisi lain, PDB ini didominasi oleh pulau Jawa sebesar 56,84%,⁵³ sedangkan pertumbuhan pada wilayah lain termasuk Kota Padang lebih lambat. Hal ini tentu saja dapat berdampak pada ketimpangan, kualitas pembangunan, dan kemiskinan.

Kedua, inflasi, yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat dan kondisi perekonomian masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah. Pada Desember 2023, inflasi Indonesia berada pada angka 2,61% (IHK 116,56).⁵⁴ Sedangkan di Kota Padang, inflasi berada pada angka 2,55% (IHK 117,62).⁵⁵ Inflasi ini menyebabkan terjadinya kenaikan harga kebutuhan sehari-hari sehingga menekan daya beli, terutama rumah tangga berpenghasilan rendah.⁵⁶

⁵⁰ Harga Berlaku (nominal) adalah harga yang berlaku pada periode penghitungan tersebut, mencerminkan nilai tambah barang dan jasa dihitung dengan menggunakan harga pasar saat itu, tanpa penyesuaian inflasi

⁵¹ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan III-2024*, diakses 10 Januari 2025 pada <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2024/11/05/2382/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2024-tumbuh-1-50-persen--q-to-q-.html>

⁵² KumparanBisnis, *Kaleidoskop 2024: Janji Semu Jokowi Ekonomi RI Tumbuh 7 Persen*, diakses pada 23 Mei 2025 pada <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kaleidoskop-2024-janji-semu-jokowi-ekonomi-ri-tumbuh-7-persen-24BAsWgFptK>

⁵³ Badan Pusat Statistik Indonesia, *loc.cit.*

⁵⁴ Badan Pusat Statistik, *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2023*, diakses 6 Februari 2025 pada <https://yogyakarta.bps.go.id/id/pressrelease/2024/01/02/1526/perkembangan-indeks-harga-konsumen-desember-2023.html>

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kota Padang, *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Gabungan 2 Kota di Provinsi Sumatera Barat Desember 2023*, diakses 6 Februari 2025 pada <https://sumbar.bps.go.id/id/pressrelease/2024/01/02/1249/desember-2023--inflasi-year-on-year-kota-padang-sebesar-2-55-persen-dan-kota-bukittinggi-sebesar-1-88-persen--secara-agregat--inflasi-year-on-year-gabungan-2-kota-sebesar-2-47-persen.html>

⁵⁶ *Ibid.*

Ketiga, pengangguran, berdasarkan data BPS Indonesia atas Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional per Agustus 2023 sebesar 5,32% (7,86 juta orang).⁵⁷ Sedangkan di Kota Padang tingkat pengangguran lebih tinggi dua kali lipat daripada rata-rata nasional, yaitu 10,86% (52.014 orang).⁵⁸ Hal ini menunjukkan bahwa terdapat persoalan struktural dan kontekstual terutama dalam penyerapan tenaga kerja di daerah. Berikut data perbandingan antara pengangguran nasional dengan Kota Padang:

Tabel 1. 4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nasional dan Kota Padang Tahun 2019-2024

Tahun	Nasional		Kota Padang	
	Jumlah Pengangguran (Juta)	Persentase TPT	Jumlah Pengangguran (Ribu)	Persentase TPT
2019	7,10	5,23	42,44	8,74
2020	9,77	7,07	42,17	13,64
2021	9,10	6,49	48,44	13,37
2022	8,42	5,86	42,37	11,69
2023	7,86	5,32	41,97	10,86
2024	7,47	4,91	48,06	9,88

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2025

Keempat, gini ratio, indikator yang digunakan untuk mengukur ketimpangan distribusi pendapatan. Pada September tahun 2024 gini ratio

⁵⁷ Badan Pusat Statistik Indonesia, *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2023*, diakses 8 Februari 2025 pada <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/2002/tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-32-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-3-18-juta-rupiah-per-bulan.html>

⁵⁸ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, *Keadaan Ketenagakerjaan Sumatera Barat Agustus 2023*, diakses 8 Februari 2025 pada <https://sumbar.bps.go.id/id/pressrelease/2023/11/06/1166/agustus-2023--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--di-sumatera-barat-sebesar-5-94-persen.html>

nasional berada pada angka 0,379,⁵⁹ sedangkan Kota Padang berada pada angka 0,324.⁶⁰ Kondisi ini menunjukkan bahwa ketimpangan di tingkat nasional dan daerah ketimpangan distribusi pendapatan signifikan. Hal ini juga berdampak pada ketimpangan kesempatan ekonomi, rendahnya mobilitas sosial, lambatnya pertumbuhan ekonomi, hambatan investasi daerah dan lain sebagainya. Berikut data perbandingan antara gini ratio nasional dengan Kota Padang:

Tabel 1. 5 Data Gini Ratio Nasional dan Kota Padang Tahun 2019-2024

Tahun	Gini Ratio Nasional	Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat	Gini Ratio Kota Padang
2019	0,380	0,306	0,310
2020	0,355	0,305	0,312
2021	0,381	0,306	0,343
2022	0,381	0,300	0,354
2023	0,388	0,280	0,312
2024	0,379	0,283	0,324

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2025

Kelima, kemiskinan, merupakan masalah sosial kompleks yang berkaitan dengan ketimpangan pendapatan. Tingkat kemiskinan nasional sepanjang masa pemerintahan presiden Jokowi mengalami perubahan secara terus menerus dan tidak signifikan. Pada Maret 2023, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,36% atau setara dengan 25,90 juta orang.⁶¹ Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang, penduduk miskin di

⁵⁹ Badan Pusat Statistik, *Gini ratio September 2024 tercatat sebesar 0,381* diakses 23 Mei 2025 pada <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2399/gini-ratio-september-2024-tercatat-sebesar-0-381.html>

⁶⁰ Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, *Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, 2024*, diakses 23 Mei 2025 pada <https://sumbar.bps.go.id/id/statistics-table/2/ODMjMg==/gini-ratio-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html>

⁶¹ Badan Pusat Statistik, *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023*, diakses 9 Februari 2025 pada <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>

Kota Padang pada 2024 mencapai 4,17%⁶² atau setara dengan 41,97 ribu jiwa.⁶³

Data menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia, termasuk Kota Padang, masih signifikan. Berikut data Badan Pusat Statistik mengenai kemiskinan di Indonesia:

Tabel 1. 6 Tingkat Kemiskinan Nasional dan Kota Padang

Tahun	Nasional		Kota Padang	
	Jumlah Penduduk (Juta)	Persentase Penduduk	Jumlah Penduduk (Ribu)	Persentase Penduduk
2019	25,14	9,41	42,44	4,48
2020	26,42	9,78	42,17	4,40
2021	27,54	10,14	48,44	4,94
2022	26,16	9,54	42,37	4,26
2023	25,90	9,36	41,97	4,17

Sumber: Diolah Peneliti Tahun 2025

Secara makro, meskipun angka kemiskinan nasional mencapai titik terendah pada 2023, ketimpangan pendapatan yang tercermin dalam stagnasi gini ratio menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi belum menyebar merata. Konsentrasi kekayaan pada kelompok mampu menyebabkan kelas menengah dan rentan tetap tertekan. Data makro (pertumbuhan PDB, inflasi, pengangguran, gini ratio, kemiskinan) menggambarkan bahwa pemerataan pembangunan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara daerah seperti Kota Padang menghadapi inflasi tinggi dan ketergantungan pada komoditas yang memperburuk ketimpangan.

⁶² Badan Pusat Statistik, *Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Persen), 2021-2023*, diakses 9 Februari 2025 pada <https://padangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njg2IzI=/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html>

⁶³ Badan Pusat Statistik, *Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Ribu Jiwa), 2021-2023*, diakses 9 Februari 2025 pada <https://padangkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/Njg1IzI=/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat.html>

Inflasi yang terus meningkat menekan daya beli rumah tangga berpenghasilan rendah dan memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena sebagian besar pengeluaran mereka tersedot untuk kebutuhan dasar. Sebagai konsekuensi, beban hidup keluarga miskin dan rentan makin memberat, yang berdampak tidak hanya pada kesejahteraan individu, tetapi juga pada stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Kondisi inilah yang menjadi dasar ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja ekonomi yang lebih lanjut menjadi faktor pendorong perubahan perilaku memilih.

Berdasarkan fenomena dan data yang telah dipaparkan, peneliti berasumsi bahwa perilaku memilih masyarakat Kota Padang pada Pemilihan Presiden Tahun 2024 tidak terlepas dari pengaruh identitas keagamaan yang unik. Masyarakat Kota Padang yang konservatif cenderung memilih pasangan calon dengan cerminan nilai ke-Islaman atau memiliki pendekatan Islam, yaitu pasangan Anies-Muhaimin. Disisi lain, ketidakpuasan terhadap kinerja ekonomi pemerintah sebelumnya atau petahana (Jokowi) telah menyebabkan penolakan hal-hal yang berkaitan dengan petahana (Jokowi). Pada Pemilihan Presiden Tahun 2024, pasangan calon dianggap sebagai perpanjangan tangan atau berkaitan dengan petahana (Jokowi), yaitu Prabowo-Gibran. Oleh karena itu, rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh identitas keagamaan terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Padang pada Pemilihan Presiden Tahun 2024?

2. Bagaimana pengaruh persepsi kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Padang pada Pemilihan Presiden Tahun 2024?

1.3 Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan pengaruh identitas keagamaan terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Padang pada Pemilihan Presiden tahun 2024.
2. Mendeskripsikan pengaruh persepsi kinerja ekonomi pemerintahan Presiden Jokowi terhadap perilaku memilih masyarakat Kota Padang pada Pemilihan Presiden tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang ilmu politik pada kajian perilaku politik. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh politik keagamaan dan persepsi terhadap kinerja pemerintahan, khususnya dalam

bidang ekonomi dalam membentuk preferensi politik masyarakat pada pemilihan umum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca mengenai perilaku memilih serta keterkaitannya dengan identitas keagamaan dan persepsi terhadap kinerja ekonomi presiden. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi partai politik atau kandidat dalam merumuskan strategi kampanye yang lebih efektif. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi pemerintah dalam memahami persepsi publik terhadap kinerja ekonomi serta dampaknya terhadap legitimasi elektoral.

